PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

klamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522 Website:dlsdikbud.karanganyarkab.go.ld E-mall: <u>disdikbud@karanganyarkab.go.id</u>KodePos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421/277 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMADIYAH PROGRAM UNGGULAN (SD MPU) KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca

: Surat dari Pimpinan Cabang Muhamadiyah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor 02.1.0/E/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar perlu diberikan ijin operasional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

Scanned y TepScanner

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian

Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penutupan dan Perubahan, Pendirian, Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 003/H/AK Tahun 2017 tentang Kriteria

dan Perangkat Akreditasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 Pendirian, Penambahan, Pedoman Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

: Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SD MPU) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a. wajib melaksanakan semua peraturan perundangundangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak

mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;

d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung

oleh Yayasan;

e. apabila dalam pelaksanaan Yayasan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, ijin operasional dapat ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 21 November 2019

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBBAYAAN KAB. KARANGANYAR

RARSA, M.Pd. ana Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Karanganyar;

Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;

4. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;

5. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;

6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;

8. Kepala Sekolah Dasar Muhamadiyah Program Unggulan (SDMPU) Kecamatan Jatipuro Karanganyar.